



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOCHAMAD SODIK
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 999949

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.630.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/124 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
3. Tanah Seluas 811 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 61.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER KF 40 Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 27.909.148

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	2.750.909.148
III. HUTANG	Rp.	82.240.925
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.668.668.223

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.